



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

TANTANGAN INTEGRITAS PPDB 2024/2025

Yulia Indahri
Analisis Legislatif Ahli Madya
yulia.indahri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Sejak dibukanya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024/2025 pada bulan Juni 2024 untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK), dinas pendidikan di berbagai daerah menekankan pentingnya tidak ada intervensi dalam proses PPDB. Keterbatasan kapasitas sekolah negeri dibanding jumlah lulusan dari jenjang sebelumnya membuat tidak semua siswa dapat diterima di sekolah negeri. Oleh karena itu, partisipasi aktif orang tua dan akurasi dalam memasukkan data menjadi kunci untuk kelancaran PPDB.

Sosialisasi tata cara pendaftaran PPDB perlu ditingkatkan, mengingat kendala teknis seperti lupa kata kunci akun dan kesalahan dalam memilih sekolah yang sering dialami peserta didik dan orang tua, terutama di daerah dengan masalah akses dan sinyal internet yang tidak merata. PPDB menawarkan berbagai jalur seperti zonasi, afirmasi, prestasi akademik, dan perpindahan tugas orang tua. Namun, masih ada tantangan seperti praktik gratifikasi yang merugikan integritas sistem.

Di beberapa daerah, minimnya animo masyarakat terhadap sekolah swasta mendorong dinas pendidikan untuk mempertimbangkan kebijakan penggratisan biaya pendidikan swasta untuk meningkatkan daya tampung dan pemerataan pendidikan. Meskipun demikian, PPDB masih menghadapi masalah besar dalam perebutan kursi dan kecurangan, yang tercermin dari survei KPK yang mencatat adanya transaksi tidak adil dan praktik suap dalam penerimaan siswa.

Di Jakarta, sebagian besar daya tampung SMP dan SMA/SMK yang tersedia di sekolah negeri tidak mencukupi jumlah pendaftar, mendorong banyak siswa ke sekolah swasta dengan biaya tambahan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi nasional untuk memastikan PPDB berjalan adil dan tanpa biaya tambahan yang memberatkan.

Kendala administrasi dan teknis seperti perubahan kartu keluarga yang menghalangi beberapa warga Jakarta dari mendaftarkan anaknya, serta peraturan zonasi yang membatasi akses ke sekolah pilihan, menjadi tantangan serius dalam PPDB. Meskipun demikian, pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan integritas dalam proses PPDB guna memastikan semua anak mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Pada tingkat nasional, PPDB terus dihadapkan pada panggilan untuk reformasi yang lebih mendalam, termasuk meningkatkan akses, mengatasi praktik korupsi, dan memastikan sistem lebih inklusif bagi semua calon peserta didik. Perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk merumuskan kebijakan yang dapat menekan kecurangan, memperluas daya tampung, serta menyediakan fasilitas pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia. Dengan demikian, tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai, memberikan kesempatan yang setara bagi semua anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu.

Permasalahan PPDB tidak hanya terjadi tahun ini. Sejak dimulai pada tahun 2017, sudah beberapa kali petunjuk teknis diubah, dan terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di tahun 2021. Secara khusus, Komisi X DPR RI di tahun lalu, dalam forum Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diadakan pada 12 Juli 2023, telah mengusulkan beberapa poin penting yang menjadi fokus terkait dengan PPDB. *Pertama*, penanganan masalah yang ada harus diselesaikan secepatnya. *Kedua*, akan dibentuk satuan tugas pengawasan PPDB yang bekerja sama dengan Ombudsman. *Ketiga*, evaluasi akan dilakukan dan dilaporkan pada bulan Oktober (tahun 2023). Terakhir, dan yang menjadi inti dari harapan DPR RI terhadap pendidikan di Indonesia adalah upaya untuk pemerataan kualitas sekolah-sekolah negeri.

Atensi DPR

Komisi X DPR RI berperan penting dalam memastikan keberhasilan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan fokus pada transparansi dan integritas. Pengawasan ketat terhadap kebijakan dan regulasi diperlukan untuk menindak praktik gratifikasi dan suap. DPR RI juga harus mendorong peningkatan kapasitas sekolah negeri dan penggratiskan biaya pendidikan di sekolah swasta untuk mengatasi ketimpangan daya tampung. Selain itu, peningkatan sosialisasi tata cara pendaftaran PPDB dan solusi teknis untuk kendala akses internet di daerah terpencil sangat krusial. Evaluasi dan perbaikan peraturan zonasi juga harus dilakukan untuk memastikan akses yang adil ke sekolah pilihan. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta pembaruan kerangka hukum melalui peraturan teknis yang progresif menjadi kunci untuk mencapai pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, mendukung tujuan pembangunan nasional Indonesia 2045.

Sumber

kompas.id, 11-13 Juni 2024;
mediaindonesia.com, 10-13 Juni 2024;
pikiran-rakyat.com, 10-12, 14, dan 15 Juni 2024;
RDP Komisi X, 12 Juli 2023; dan
tempo.co, 11-13, dan 14 Juni 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>

@pusaka_bkdprri

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Ariesy Tri Mauleny

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024